

**PERANAN MAJALAH *THE NEW YORK TIMES* DALAM MEMBENTUK OPINI  
PUBLIK TERHADAP WILAYAH TIMUR TENGAH PASCA KEJADIAN 9/11  
DALAM KONTEKS PROPAGANDA INTERNASIONAL 2001-2007**

**RAHMAT HARYAMA<sup>1</sup> DAN INDRA PAHLAWAN<sup>2</sup>**

**Yama\_cesc@yahoo.com**

***Abstract***

*This research try to explain the authors raise a case study of propaganda of American mass media, the role of The New York Times, the media which giving negative image of the middle east. In this discussion the author focuses on role The New York Times ways and an effort to create the the public opinion toward US policy and middle east. Starting from framing of the news which giving the good image of the US policy toward the middle east using the glittering technique and made the a fear, dread or hatred of Islam using the name calling technique. The research shows that the support toward US war policy against Afghanisthan and Iraq and the rise of the islamicphobia is the result of mass media framing including The New York Times. Shown in news framing done by this news agencies, and the effect which couse by this framing such as support on America foreign policy, misperception of Iraqi war and rise of Islamicphobia*

***Keywords : Propaganda, Mass Media, Glittering, Name Calling, Islamicphobia***

**Pendahuluan**

Penelitian ini bertujuan menganalisa mengenai peran media massa Amerika Serikat khususnya koran *The New York Times* membentuk opini masyarakat Internasional pasca kejadian 9/11 dalam konteks propaganda internasional, dimana pasca kejadian 9/11 media massa Amerika Serikat termasuk *The New York Times* memberitakan mengenai kejadian ini. Salah satu fungsi dari keberadaan media massa adalah wadah (media) dan arena dalam membahas dan menyiarkan berbagai macam wacana/topik dan perkembangan gagasan atau ide dalam masyarakat sebuah negara, dalam penyebaran ide-ide dalam bentuk ideologi biasa dilakukan dengan cara objektif, netral dan bebas nilai atau dengan cara manipulatif, rekayasa dan penggiringan serta pembentukan opini . Pada akhirnya media sulit bersifat netral dan cover both side dalam pemberitaanya. Ideologi media secara mikro bukan sebagai cerminan dari sebuah realitas sosial, tetapi bisa saja sebagai representasi dari ideologi media. Pengamatan secara makro, wacana dalam sebuah media massa menjadi alat konstruksi realitas sosial mengingat bahwa pada kenyataannya, realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut.

Media tidak dipandang sebagai wilayah netral, tetapi sebagai bertemunya berbagai kepentingan dan pemaknaan berbagai kelompok, dengan demikian media massa dituntut untuk menyampaikan informasi yang netral dan berimbang kepada khalayak pembaca. Media massa juga merupakan produsen informasi politik dan sosial yang harus setia kepada pemilik media

---

<sup>1</sup> Rahmat Haryama, Mahasiswa Hubungan Internasional

<sup>2</sup> Indra Pahlawan, Dosen Tetap Jurusan Hubungan Internasional

yang menaunginya. Menurut Chomsky adanya teknik propaganda dalam media, dimana kekuasaan nyata yakni kalangan pebisnis atau pemilik modal (kapitalis), mereka ini yang mampu merekayasa persetujuan dengan akses ke ranah politik, sumber daya yang dimilikinya, serta akses media massanya<sup>3</sup>.

Media justru dapat menjadi subyek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarakan kepada khalayak. Media massa cetak merupakan salah satu sarana penyampaian informasi yang efektif yang mampu menjangkau cukup banyak pembaca di semua lapisan masyarakat. Media massa sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Propaganda media yang dikembangkan Chomsky misalnya dibutuhkan untuk peran media massa yang terkonsentrasi pada kekayaan, berkonflik, dan kepentingan kelas<sup>4</sup>.

Analisis wacana kritis berpendapat bahwa tidak ada media massa yang benar-benar netral, media massa berada di bawah kepemilikan perorangan atau organisasi, dikelola oleh sekelompok pengelola, dan akhirnya dibaca oleh sekelompok pembaca tertentu pula. Media bukanlah saluran bebas dan netral, setiap proses pemberitaan media massa yang dikeluarkan suatu negara telah melalui proses yang panjang, mulai dari proses pengumpulan informasi, proses produksi hingga distribusi dan sebagainya, yang telah diperhitungkan secara cermat dan teliti dari berbagai aspek dimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Alasan tersebut yang membuat media massa menjadi tidak benar-benar netral atau tidak obyektif, tetapi justru berpihak<sup>5</sup>.

Menurut Chomsky bahwa kepentingan pada sebuah media massa tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan di luar media itu sendiri, terutama kepentingan yang berhubungan erat dengan informasi yang disajikan. Kepentingan utama yang selalu terbungkus secara rapi di media setidaknya ada dua, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan. Kuatnya kedua kepentingan (*economy interest and power interest*) inilah yang menjadikan media tidak dapat netral tidak cover both side. Bahkan fakta yang disajikan pun selalu dipolitisir. Tidak mengherankan jika Chomsky mengatakan bahwa informasi di media hanyalah sebuah rekonstruksi. Rekonstruksi yang tertulis atas suatu realitas yang ada di masyarakat. Keraguan Noam Chomsky akan propaganda media massa dalam rekayasa opini publik bukanlah tanpa bukti akurat.

Sebagai contoh adalah reaksi terhadap pengeboman (atau lebih tepatnya penjatuhan kapal) yang dilakukan di menara kembar World Trade Center (WTC) dan Pentagon Amerika Serikat tanggal 11 September 2001, Amerika Serikat memulai kampanye Perang Melawan Terorisme mereka di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda, serta untuk menangkap Osama bin Laden. Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan ke Afghanistan. Hal ini dilakukan karena Amerika menuduh Afghanistan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya terror tersebut.

Serangan teroris pada tanggal 11 September 2001, atau lebih dikenal dengan sebutan tragedi 9/11, memberikan pukulan yang sangat besar bagi Amerika karena mereka merasa sangat marah. Rasa marah tersebut ditujukan kepada kelompok Islam garis keras yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang ditengarai sebagai perencana dan pelaksana

---

<sup>3</sup> Noam Chomsky, *Kuasa Politik Media*, (Yogyakarta: Pinus Jogjakarta, 2005), hal.3.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal.5

<sup>5</sup> Hikmat Kusumaningrat&Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori&Praktik*, (Bandung: Rosda, 2006), hal. 2

serangan tersebut. Padahal dalam penyelidikan yang telah dilakukan belum ada bukti-bukti yang kuat mengenai keterlibatan Osama dalam serangan teror tersebut, akan tetapi Amerika sudah yakin bahwa peristiwa tersebut adalah hasil serangan jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden.

Sejak tragedi 9/11, pemerintah AS menyatakan perang dengan apapun jenis terorisme. Amerika Serikat merespons dengan meluncurkan serangan oleh War on Terorisme, menginvasi Afghanistan untuk menyerang Taliban, dan teroris Al-Qaeda, tindakan selanjutnya adalah Amerika Serikat membuat suatu undang-undang yang dinamakan dengan PATRIOT Act. Banyak negara-negara lain juga diperkuat dengan undang-undang anti-terorisme dan penegakan hukum memperluas kekuasaan.

Propaganda Amerika melawan terorisme disampaikan lewat media massa global yang dapat berpengaruh secara internasional, misalnya melalui media massa *The New York Times*. Tentu saja dalam hal ini diperlukan suatu setting pada media-media di seluruh dunia dimana untuk menguatkan suatu berita bahwa terorisme itu sendiri penggerakannya adalah orang-orang Timur-Tengah.

Media adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu propaganda politik media massa merupakan suatu media dimana ditujukan kepada seluruh khalayak ramai, heterogen serta berita atau pesan yang disampaikan pun dapat tersebar dengan cepat dan serentak. Dalam perkembangannya tentu saja media massa mempunyai banyak pihak yang terlibat di dalamnya sebagai instrument pemenuhan kepentingan. Sebut saja negara, pasar, kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Dalam peristiwa ini, AS dikejutkan oleh munculnya nara sumber media Arab dalam perang Afghanistan, sehingga Barat kembali memberlakukan standar ganda dalam kebebasan pers. Narasumber yang dimaksud yaitu munculnya media TV Al-Jazeera. Apalagi dalam isu yang sangat sensitif seperti perang Afghanistan. Sebelumnya tidak pernah seperti ini, Hegemoni pers global oleh Barat telah memarjinalkan kaum muslimin dan terutama berita jihad dari mujahidin. Selama ini kaum muslimin hanya mendapat berita-berita dunia dari kantor-kantor berita seperti Reuters, AFP, CNN, BBC, ABC, *The New York Times*, dan sejenisnya yang menyampaikan berita-berita menurut keinginan propaganda ideologis mereka dan mendiskreditkan informasi dari kaum muslimin, khususnya mujahidin. Menurut pakar media Inggris keturunan Arab dari Universitas Oxford, Prof. Dr. Lezli Machloulin, Al Jazeera berhasil menghentikan monopoli media Barat sebagai sumber berita selama ini dengan menayangkan berita-berita yang obyektif.<sup>6</sup>

Tayangan Al Jazeera sudah cukup berimbang. Karena setiap konferensi pers pejabat AS mulai dari Presiden Bush hingga para menteri termasuk Menhan selalu disiarkan langsung oleh Al Jazeera lengkap dengan terjemahan bahasa Arab. Tetapi saat Al Jazeera menyiarkan pernyataan tokoh Al-Qaeda lantas disebut propaganda. Pihak AS takut dengan opini umum warga negaranegara Barat sendiri yang sangat meyakini setiap laporan media massa termasuk korban sipil yang ditayangkan Al Jazeera, sehingga khawatir opini umum akan berbalik menghujat pemerintahan mereka atas kekeliruan yang dilakukan di Afghanistan.

Adian Husaini pernah mengatakan bahwa Barat mengontrol informasi dunia dan memproduksi rata-rata 6 juta kata per hari, sementara Timur (Islam) hanya mampu 500 ribu

---

<sup>6</sup>Barat Terkejut Hadapi Narasumber Media Arab dalam Perang Afghanistan diakses dari <http://www.gatra.com/2001-10-17/artikel.php?id=11688> pada 10 agustus 2012

kata per hari<sup>7</sup>. Dari perbandingan produksi kata melalui berbagai jenis media cetak, elektronik, dan dunia maya tampak jelas bahwa diseminasi nilai yang terus menerus dicangkakan ke benak manusia adalah nilai-nilai, doktrin, ideologi serta budaya Barat. Hal ini dapat terlihat dari jaringan informasi seperti warta berita *The New York Times* menyampaikan terus-menerus melalui website yang bisa diakses di seluruh pelosok dunia dan melakukan brain washing (cuci otak) tanpa henti. Media massa nasional pun lebih banyak merujuk kepada informasi yang diproduksi oleh kantor berita *The New York Times* ini.

### **Tinjauan umum The New York Times online**

Dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan penelitian pada *The New York Times News Online*, karena koran berita times ini telah dapat diakses hampir di 5 benua di dunia. Pada hakikatnya walaupun sebuah korporasi swasta *The New York Times* tetap merupakan media yang bekerjasama dengan pemerintah, karena pada biasanya The Times merupakan bagian pendukung konservatif. Eksistensi *The New York Times* tidak dapat terlepas dari kerjasama dan kesepakatan yang dibuat dengan Pemerintah AS.

Koran *Times* pertama sekali terbit di Amerika Serikat pada 18 september 1851, setelah lebih dahulu diterbitkan di Inggris pada 1785. *Times* di Amerika Serikat Koran ini terkenal dengan nama *The New York Times* yang merujuk kepada kota tempat kantor berita ini berpusat. *Times* di Amerika Sendiri diterbitkan oleh Henry Jarvis Raymond, seorang jurnalis sekaligus politisi

*The New York Times* mulai terkenal sekitar tahun 1870-1871, pada saat itu *The New York Times* menerbitkan serangkaian analisa William Magear Tweed, mengenai situasi politik menjelang pemilihan Presiden pada masa itu. Pada tahun 1880-an *The New York Times* mengalihkan afiliasi politiknya menjadi netral setelah beberapa tahun mendukung partai Republik. Pada tahun 1884 *The New York Times* kehilangan kepopulerannya dan menjadi bangkrut menyusul kekalahan calon presiden partai Demokrat Grover Cleveland yang pada saat itu didukung oleh *The New York Times*, setelah beberapa tahun menghilang akhirnya pada tahun 1896 kembali terbit setelah diakuisisi oleh Adolph Ochs.

Dekade 1940 koran *The New York Times* memperluas jangkauan beritanya, dengan munculnya kolom kuis dan juga kolom fashion pada tahun 1914 dan 1945. *The New York Times* Amerika meluncurkan edisi internasionalnya pada tahun 1946, akan tetapi dihentikan pada tahun 1967 menyusul merger *The New York Times* dengan New York Herald dan Washington Post untuk menerbitkan Internasional Herald Tribune di Paris.

*The New York Times* hadir dalam bentuk online (*Website*) sejak tahun 1996, dan menjadi salah satu situs internet teratas dunia,. Website *The New York Times* telah memiliki 555 juta tampilan halaman pada Maret 2005. *The nytimes.com domain* telah menarik setidaknya 146 juta pengunjung setiap tahunnya pada tahun 2008 menurut sebuah studi Compete.com. *The New York Times* , berada pada peringkat ke-59 dengan jumlah -pengunjung terbanyak, dan telah dikunjungi sebanyak 20 juta pengunjung pada bulan maret 2009, hal ini menjadikan *The New York Times* sebagai salah satu situs surat kabar yang paling dikunjungi<sup>8</sup>. Selain hadir dalam bentuk website *The New York Times* juga muncul dalam bentuk mobile dengan nama *The New York Times Reader*, hal ini merupakan hasil dari kerjasama antara *The New York Times* dengan salah satu

---

<sup>7</sup> Cyber war dalam media massa tersedia <http://www.djogdjaku.110mb.com/book/cyberwar/cyberjihad.php> pada 27 Agustus 2012

<sup>8</sup> Deka Primowardhani. 2012. "Kelompok Kepentingan dan Media : Studi Kasus Peran Yahudi Mengendalikan Media CNN (*Cable News Network*) Dalam Pencitraan Negatif Timur Tengah" (Skripsi Sarjana, FISIP UR Pekanbaru).

Programer terbesar dunia yaitu Microsoft yang berisi hal-hal mengenai jurnalisme dan teknik reportasi, pada tahun 2008 *The New York Times* muncul sebagai program dalam ipod dan iphone, program ini memungkinkan penggunaanya mendownload seluruh artikel maupun berita *The New York Times*

Keberpihakan ini pada hakikatnya bukan hanya masalah dari *The New York Times*, karena para pengamat dan analis menyebutkan hampir 80% dari media yang beroperasi di Amerika Serikat bukanlah media yang netral<sup>9</sup>, melainkan merupakan hasil control tersembunyi dari pemerintahan Amerika Serikat. Dalam kasus *The New York Times* keberpihakan ini sendiri dapat dilacak sejak awal berdirinya.

*The New York Times* sendiri didirikan oleh seorang anggota kongres Amerika Serikat yang beraliran Konservatif, keberpihakan ini kemudian berubah ketika *The New York Times* mendukung Glover Cleveland yang maju mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Setelah pengakusisian oleh Adolph Ochs, *The New York Times* kembali menyatakan diri sebagai media netral, akan tetapi hal ini tidak sepenuhnya benar karena dalam beberapa peristiwa yang terjadi, Koran ini kembali menunjukkan keberpihakannya terhadap pemerintahan Amerika Serikat khususnya Kaum Konservatif, contoh paling jelas dari keterkaitan *The New York Times* dengan pemerinthan Amerika Serikat terlihat sangat jelas dalam kasus konflik Israel-Palestina.

### **Framing Berita Politik**

Ada beragam definisi yang diberikan para ahli komunikasi terkait istilah framing dalam media massa. Menurut Robert N. Entman, seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing, mendefinisikan framing sebagai berikut:<sup>10</sup>

*"to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/ or treatment recommendation."*

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Menurut Todd Gitlin, framing dipandang sebagai strategi bagaimana realitas/ dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca.<sup>11</sup>

Sementara itu, Amy Binder mendefinisikan framing sebagai skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung.<sup>12</sup>

Tegasnya, framing merupakan sebuah cara bagaimana suatu peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas atau peristiwa, sehingga makna dari peristiwa tersebut menjadi lebih mudah dipahami, lebih menyentuh dan mudah diingat oleh khalayak.

### **Framing Model Pan dan Kosicki**

Model framing yang diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ini adalah salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai.<sup>13</sup> Menurut Pan dan Kosicki,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>10</sup> Thomas Koenig. *Frame Analysis: Theoretical Preliminaries*,  
<http://www.ccsr.ac.uk/methods/publications/frameanalysis/> akses 20 Oktober 2012

<sup>11</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, cet. ke-4 (Yogyakarta: LKiS, 2007)., hlm. 67

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 68

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 139-142

ada konsepsi dari framing yang saling berkaitan, yakni konsepsi psikologi dan konsepsi sosiologi.<sup>14</sup>

Bagi Pan dan Kosicki, framing pada dasarnya melibatkan kedua konsepsi tersebut. Keterkaitan kedua konsepsi tersebut terlihat suatu berita diproduksi dan dikonstruksi oleh wartawan. Pertama, proses konstruksi tersebut melibatkan nilai sosial yang melekat pada diri wartawan.<sup>15</sup> Nilai sosial yang tertanam mempengaruhi bagaimana realitas dipahami. Kedua, ketika menulis dan mengkonstruksi berita, wartawan mempertimbangkan karakteristik khalayak.<sup>16</sup> Ketiga, proses konstruksi tersebut sangat ditentukan oleh proses produksi yang selalu melibatkan standar kerja, profesi jurnalistik, dan standar profesional dari wartawan.<sup>17</sup>

Pan dan Kosicki berasumsi bahwasanya setiap berita memiliki frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame ini berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat frame-nya yang dimunculkan dalam teks.<sup>18</sup> Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi ke dalam empat struktur besar sebagai berikut:<sup>19</sup> **Pertama** Sintaksis adalah cara wartawan menyusun berita. Dengan demikian struktur sintaksis dapat diamati melalui bagan berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, kutipan yang diambil, dan sebagainya), **Kedua** Skrip adalah cara wartawan mengisahkan fakta. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Skrip memfokuskan perangkat framing pada kelengkapan berita: (a) What (apa), (b) When (kapan), (c) Who (siapa), (d) Where (di mana), (e) Why (mengapa), (f) How (bagaimana). **Ketiga** Tematik adalah cara wartawan menulis fakta. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam preposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini mempunyai perangkat framing: (a) Detail, (b) Maksud dan hubungan kalimat, (c) Nominalisasi antar kalimat, (d) Koherensi, (e) Bentuk kalimat, (f) Kata ganti. Unit yang diamati adalah paragraf atau proposisi. **Keempat** Retoris adalah cara wartawan menekankan fakta. Struktur retorik berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai leksikon/pilihan kata, idiom, grafik dan gambar yang diopakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu pada pembaca.

Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan framing dari suatu media. Tendensi atau kecondongan wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat struktur tersebut.

## Contoh Berita

### *Is Al-Qaeda on the Run in Iraq?*

*Ditulis oleh* : Bobby Ghosh

*Terbit pada* : Mei 23, 2007

---

<sup>14</sup> Eriyanto, *op cit.*, hlm.251

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 252-253.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 254

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Alex Sobur, *op cit.*, hlm.175.

<sup>19</sup> Eriyanto, *loc cit.*, hlm.254-266; Lihat pula Alex Sobur, hlm.175-177.

*There is good news from Iraq, believe it or not. It comes from the most unlikely place: Anbar province, home of the Sunni insurgency. The level of violence has plummeted in recent weeks. An alliance of U.S. troops and local tribes has been very effective in moving against the al-Qaeda foreign fighters. A senior U.S. military official told me—confirming reports from several other sources—that there have been "a couple of days recently during which there were zero effective attacks and less than 10 attacks overall in the province (keep in mind that an attack can be as little as one round fired). This is a result of sheiks stepping up and opposing AQI [al-Qaeda in Iraq] and volunteering their young men to serve in the police and army units there." The success in Anbar has led sheiks in at least two other Sunni-dominated provinces, Nineveh and Salahaddin, to ask for similar alliances against the foreign fighters. And, as THE TIMES's Bobby Ghosh has reported, an influential leader of the Sunni insurgency, Harith al-Dari, has turned against al-Qaeda as well. It is possible that al-Qaeda is being rejected like a mismatched liver transplant by the body of the Iraqi insurgency.*

*The good news comes with caveats, of course. The removal of AQI's havens in Anbar may ultimately hurt the terrorists' ability to blow up markets in Baghdad, but it hasn't yet. As I reported in September 2005, there is also the scandalous reality that an alliance with the tribes was proposed by U.S. Army intelligence officers as early as October 2003 and rejected by L. Paul Bremer's Coalition Provisional Authority on the grounds that "tribes are part of the past. They have no place in the new democratic Iraq." The damage caused by that myopic stupidity may never be repaired: it gave al-Qaeda a base in the Sunni tribal areas, which enabled the sustained, spectacular anti-Shi'ite bombing campaign, which, along with the Sunnis' historic disdain for the Shi'ite majority, created the conditions for the current civil war. "Just because the Sunni tribesmen have joined with us in Anbar doesn't mean they like the Baghdad government," a senior Administration official told me. "They just hate al-Qaeda more."<sup>20</sup>*

Bahwa di Timur tengah sendiri, segala macam bentuk penyerangan yang dilakukan Al-Qaeda adalah sebuah kegiatan terorisme. Bahkan di dalam wilayah yang merupakan tempat asal suku Sunni, yaitu suku yang banyak ada di kelompok Al-Qaeda. Pemahaman bentuk terorisme adalah segala macam yang dilakukan oleh Al-Qaeda, yang mengancam jiwa seluruh masyarakat di Timur Tengah, merupakan hal yang di generalisir. Dengan diberitakannya dukungan suku Sunni akan pemberantasan Al-Qaeda di timur tengah oleh Amerika, memberikan arti bahwa Amerika adalah Negara yang tepat untuk memberantas bentuk terorisme tersebut.

Media massa memberikan framing bahwa Al-Qaeda juga ditolak oleh wilayah mereka, itu memberikan arti bahwa AS berhak melakukan pembinasaaan terhadap kelompok ini. Pemberitaan ini yang menunjukkan bahkan suku Sunni sendiri merasa tidak menyukai kelompok Al-Qaeda ini, maka dengan begitu, akan sangat mudah untuk Amerika dan tentaranya menyerang Irak.

### **Dukungan Dunia Internasional Terhadap Kebijakan Perang Amerika Serikat**

Opini publik secara global bukanlah sebuah hal baru dalam kebijakan luar negeri AS. Woodrow Wilson, seorang Presiden Amerika Sendiri dengan mengetahui dan juga mengatur opini publik adalah bentuk penguasaan dunia<sup>21</sup>. Namun masalah opini publik ini kembali menjadi mendapatkan perhatian khusus, sebagai hasil globalisasi, dan juga untuk memperjelas dominasi

---

<sup>20</sup> *Is Al-Qaeda on the Run in Iraq?* Diakses dari [www.TheTimesonline.com](http://www.TheTimesonline.com) pada tanggal 12 agustus 2012

<sup>21</sup> Ninkovich, Frank. 1999. *The Wilsonian Century: United States Foreign Policy Since 1900*. Chicago: University Of Chicago Press. 1999, Hal 67

politik, ekonomi dan militer Amerika Serikat di dunia<sup>22</sup>. Hal ini terlihat jelas ketika George W. Bush menunjuk mantan eksekutif advertasingnya sebagai *secretary of state for public diplomacy and public affairs* untuk mengemban tugas "mengubah citra Amerika kebijakan luar negeri"<sup>23</sup>, penunjukan ini secara langsung menunjukkan perhatian Amerika Serikat terhadap opini publik.

Membentuk opini mengenai citra kebijakan luar negeri ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan oleh Amerika Serikat mengingat sangat luasnya jangkauan media Negara ini. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Media Amerika Serikat menggiring opini publik untuk mendukung kebijakan Amerika Serikat dalam Invasi Afghanistan dan juga Invasi terhadap Irak. Dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Benjamin E. Goldsmith dan juga rekannya. Dari 62 negara di dunia yang dijadikan sampel oleh mereka lewat sebuah survey, hampir 70% warga dari negara-negara tersebut menyetujui tindakan Amerika Serikat untuk menggunakan tindakan militer dalam menghadapi Afghanistan<sup>24</sup>, sebanyak 17% menyatakan tidak setuju dan sisanya menyatakan tidak tahu.

Dukungan ini sendiri merupakan hasil akumulasi dari framing terhadap pemberitaan mengenai serangan 9/11 dengan kedua Negara ini, dalam analisa yang dilakukan sebuah lembaga survey menyebutkan tingkat dukungan perang terhadap perang Irak dan Afghanistan sangat dipengaruhi oleh keberadaan media massa dalam kasus ini adalah *The News York Times*<sup>25</sup>. Survey ini juga mengungkapkan fakta yang sangat menarik, beberapa dari responden khususnya Amerika Serikat tidak mengetahui adanya negara Afghanistan sebelum terjadinya serangan 9/11, bahkan hingga sekarang pun beberapa dari mereka tidak dapat menyebutkan ibukota Negara yang di Invasi oleh militer Amerika Serikat ini.

### **Mispersepsi Mengenai Perang Irak**

Perang Irak dan akibatnya telah menimbulkan pertanyaan menarik tentang kapasitas eksekutif untuk memperoleh persetujuan publik terhadap kekuatan militer useof dan tentang peran media bermain dalam proses ini. Sejak awal, pemerintahan Bush menghadapi tantangan unik dalam upaya untuk melegitimasi keputusan untuk pergi berperang. Karena perang itu tidak diminta oleh berlebih-lebihan terhadap Amerika Serikat atau kepentingannya, dan tidak disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, pemerintahan Bush menyatakan bahwa perang itu diperlukan atas dasar potensi ancaman<sup>26</sup>. Karena bukti untuk ancaman ini tidak sepenuhnya terwujud, pemerintahan Bush memimpin publik untuk percaya bahwa Irak mengembangkan senjata pemusnah massal (WMD) dan memberikan dukungan besar bagi kelompok al Qaeda teroris. Tantangan bagi pemerintah kemudian diintensifkan ketika Amerika Serikat menduduki Irak dan tidak dapat menemukan bukti yang menguatkan diharapkan.

Dari awal masyarakat bersimpati dengan gagasan menggulingkan Saddam Hussein, walaupun hanya sebagian kecil orang Amerika siap untuk pergi berperang dengan Irak tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Mayoritas itu cenderung percaya bahwa Irak memiliki

---

<sup>22</sup> Holsti, Ole R. 1992. Public Opinion And Foreign Policy: Challenges To The Almond-Lippmann Consensus. *International Studies Quarterly* 36 (4): 436-66.

<sup>23</sup> Holsti, Ole R 1996. *Public Opinion And American Foreign Policy*. Ann Arbor: University Of Michigan Press.

<sup>24</sup> Benjamin E. Goldsmith Dkk. *American Foreign Policy And Global Opinion, Who Supported The War In Afghanistan?* .Sage Publications. 2005. Hal 420

<sup>25</sup> Scott L. Althaus. "American News Consumption During Times Of National Crisis". *Jurnal Political Science & Politics* September 2002 hal508

<sup>26</sup> Steven Kull, CLAY Ramsay, *Misperceptions, the Media, and the Iraq War*, *Jurnal Political Science & Politics* September 2005 vol 118. No4 hal 569



program WMD dan mendukung Al Qaeda. Namun, sebagian besar tidak yakin bahwa kasus itu cukup kuat untuk membenarkan mengambil tindakan sepihak.<sup>27</sup> Mayoritas lebih suka untuk terus mencari bukti lebih tegas melalui proses inspeksi PBB dan terus mencari dukungan dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, ketika Presiden Bush memutuskan untuk pergi berperang, sebagian besar menyatakan dukungan publik. Lebih signifikan, ketika Amerika Serikat gagal menemukan bukti yang diharapkan yang akan menguatkan asumsi pemerintahan yang mendorong perang, mayoritas tetap mendukung keputusan untuk pergi berperang.

Tentu saja, kesalahan persepsi tidak berkembang tanpa alasan. Administrasi menyebarkan informasi secara langsung dan dengan implikasi. Pers mengirimkan informasi ini dan, setidaknya dalam teori, memberikan analisis kritis. Sumber pembaca tentang berita atau seberapa dekat satu memperhatikan berita dapat mempengaruhi apakah atau bagaimana persepsi dapat berkembang.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemungkinan peran kesalahan persepsi dalam dukungan publik bagi perang Irak, dan peran media dalam proses ini sebelum dan selama perang, *the Program on International Policy Attitudes* (PIPA) melakukan serangkaian jajak pendapat dengan pemungutan suara membentuk *Knowledge Networks* (KN). Dari Januari sampai Mei 2003, satu set lebih pertanyaan yang ditanyakan dalam empat jajak pendapat berbeda. Kemudian, *Knowledge Networks* mengembangkan seperangkat lebih sistematis pertanyaan yang termasuk dalam serangkaian tiga jajak pendapat, yang dilakukan dari Juni sampai September, dengan total 3,334 responden. Hasil ini dikombinasikan dengan temuan dari empat jajak pendapat lain, yang dilakukan dari Januari hingga Mei, untuk total data set 8.634 responden. Selain itu, data polling yang relevan dari organisasi lain dianalisis, termasuk jajak pendapat yang menanyakan pertanyaan tentang kemungkinan kesalahan persepsi.

Berbagai kemungkinan kesalahan persepsi mengenai alasan berperang dengan Irak. Jika warga Amerika percaya bahwa Amerika Serikat telah menemukan WMD di Irak atau telah menemukan bukti bahwa Irak memberikan dukungan kepada Al-Qaeda, maka warga mungkin telah melihat perang seperti yang dibenarkan sebagai tindakan bela diri bahkan tanpa persetujuan PBB. Jika warga Amerika percaya bahwa opini publik dunia yang didukung Amerika Serikat akan perang dengan Irak, maka warga Amerika telah melihat perang sebagai sesuatu yang sah bahkan jika beberapa anggota Dewan Keamanan PBB menentang.

Sebelum dan sesudah perang Irak ada sebuah persepsi yang berkembang dalam masyarakat Amerika Serikat dan masyarakat Internasional mengenai keterkaitan Irak dan Al-Qaeda. Dalam poling yang dilakukan oleh *Program on International Policy Attitudes/Knowledge Networks*, pada bulan Januari 63% responden yang dimintai pendapatnya menyatakan bahwa Irak adalah dalang dibalik terjadinya serangan 9/11, bahkan 13% yakin bahwa Irak memfasilitasi serangan Al-Qaeda.

Pada bulan Juni dan Agustus, survey kembali dilakukan dengan pertanyaan, "Apakah Anda percaya bukti yang jelas bahwa Irak mendukung Al Qaeda telah ditemukan di Irak atau tidak?" Pada bulan Juni, 48 persen mengatakan bahwa bukti yang jelas telah ditemukan, dengan hanya 33 persen mengatakan bahwa itu tidak dan 19 persen mengatakan responden merasa tidak yakin. Meskipun diskusi yang intensif dari masalah di pers, pada bulan Agustus jumlahnya dasarnya sama: 50 persen percaya bukti telah ditemukan, 35 persen percaya bahwa itu belum, dan 14 persen tidak yakin<sup>28</sup>. Empat tahun setelah perang Irak angka ini terus berkurang, survey

---

<sup>27</sup> *Ibid* hal 560

<sup>28</sup> *Ibid.* hal 563

kembali yang dilakukan pada bulan yang sama setelah empat tahun Invasi. Angka kepercayaan mengenai penemuan bukti dan juga keterlibatan Irak dengan turun hingga hanya 20%.

### **Munculnya *Islamphobia* ditengah masyarakat Internasional**

*Islamphobia* adalah sebuah prasangka buruk terhadap Islam yang disertai dengan kebencian dan juga ketakutan yang tidak rasional terhadap agama Islam, istilah ini sendiri telah dikenal didunia barat sejak decade 1980-an, konsep ini sendiri telah muncul sejak 1970 dalam tulisan Edward Said yang berjudul *Orientalism*<sup>29</sup>. *The British Runnymede Trust* sebuah lembaga yang antisemitis berbasis di Inggris mendefinisikan *Islamphobia* sebagai bentuk kebencian, ketakutan serta ketidaksukaan terhadap Islam, hal ini mengacu kepada praktek diskriminasi yang dilakukan dalam bidang ekonomi serta kehidupan bermasyarakat. Selain diskriminasi konsep *Islamphobia* menurut *The British Runnymede Trust* juga meliputi anggapan bahwa Islam tidak lebih dari sebuah ideology yang menganut kekerasan<sup>30</sup>, dan tidak dapat mentoleransi keberadaan kaum lain.

*The European Monitoring Centre On Racism And Xenophobia (EUMC), A European Union*, sebuah badan Uni Eropa yang bertanggung jawab mengenai rasisme dan Xenophobia, merilis bahwa dalam *Islamphobia* kembali muncul ditengah masyarakat Uni Eropa khususnya sejak tahun 2000-an, hal ini terkait dengan meningkat pemberitaan mengenai serangan 9/11 dan keterkaitan umat muslim dalam serangan tersebut<sup>31</sup>. *Islamphobia* di Eropa telah menjadikan umat muslim dinegara-negara telah berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan, bahkan dibeberapa Negara Eropa barat, seperti Prancis dan juga Inggris mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat sangat seperti larangan pemakaian jilbab diarea publik dan pengetatan aturan Imigrasi terhadap Imigran yang berasal dari Timur-Tengah dan juga negara-negara Muslim.

Dalam beberapa penelitian dan survey, pemberitaan media barat yang selalu menggambarkan Islam sebagai agama yang menjunjung kekerasan dan juga pengidentikkan muslim sebagai teroris yang bertanggung jawab atas situasi ini. Mehdi Hasan pada tahun 2009 menyebutkan pemberitaan yang berlebih mengenai sedikit terorisme yang dilakukan oleh umat Muslim dan pemberitaan yang sedikit mengenai terorisme yang dilakukan oleh ekstrimis kulit putih lah yang menjadi akar permasalahan *Islamphobia* sendiri<sup>32</sup>, padahal tingkat penyerangan kaum muslim jauh lebih rendah dari warga kulit putih biasa.

Di Amerika sendiri dalam poling dan juga survey yang dilakukan ABC News, menyebutkan opini mengenai Islam pasca 9/11 menjadi korban dari pemberitaan berlebihan oleh media. Dalam survey ini enam dari sepuluh warga Amerika merasa mereka rentan atas keberadaan Islam, bahkan merasa sama sekali tidak senang atau membenci Islam dan empat dari responden benar-benar tidak menyukai Islam dan juga Arab. ABC News juga melaporkan bahwa 27% dari warga Amerika Serikat mengakui bahwa mereka takut dan juga membenci Islam<sup>33</sup>, sebanyak 30% juga menyatakanb merasa tidak nyaman bila harus berada dalam lingkungan islam.

---

<sup>29</sup> Said, E. W . *Orientalism*. New York, NY: Vintage Books. 1970 Hal 58-75

<sup>30</sup> Quraishi, Muzammil. *Muslims And Crime: A Comparative Study*, Ashgate Publishing Ltd., 2005, Hal. 60.

<sup>31</sup> Allen, Chris; Nielsen, Jorgen S.; *Summary Report On Islamophobia In The EU After 11 September 2001 (Mei 2002)*, EUMC.

<sup>32</sup> Hasan Mehdi. *Know Your Enemy*. New Statemen. Terbit Pada 9 Juli 2009, Diakses Dari Www.Newstatemen.Com Pada 30 Januari 2013.

<sup>33</sup> Yulyadi Lili. *Islamphobia : Myth Of Islamic Threat In Indonesia 2001-2004* . Jurnal Sejarah Hal 149-151. Diakses Dari Www.Academica.Edu Pada 2 April 2013

Di Indonesia sendiri yang merupakan Negara dengan penganut Islam terbesar dunia pun tidak lepas dari permasalahan *Islamophobia*, Lili Yulyadi dalam tulisannya mengenai *Islamophobia : Myth Of Islamic Threat In Indonesia 2001-2004*, menjelaskan bahwa kekerasan agama di Indonesia telah meningkat sejak tahun 2001 hampir sama dengan fenomena yang terjadi diberbagai belahan dunia lain, walaupun kekerasan ini masih bersifat verbal dan belum berujung terhadap kekerasan fisik, akan tetapi menurut Lili dalam analisa stereotipe jelek telak melekat kepada umat muslim konservatif di Indonesia, stereotipe ini seperti anggapan teroris kepada pria yang memelihara janggut dan juga wanita yang memakai pakaian yang sangat tertutup dan bercadar, dan juga cap sebagai tempat belajar teroris yang diberikan kepada madrasah.

Menjelaskan implikasi teoritis serta keterbatasan studi dan rekomendasi-rekomendasi penulis yang akan dijelaskan dalam bab ini. Penelitian ini didasarkan dari ketertarikan penulis sendiri terhadap penelitian ini, yaitu ingin tahu Peranan *The New York Times* Dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Wilayah Timur Tengah Pasca Kejadian 9/11. Disini penulis tertarik karena *The New York Times* yang merupakan sebuah surat kabar berbasis ini Amerika Serikat, melalui beritanya melakukan penggiringan atau membentuk opini publik mengenai kebijakan Amerika Serikat di Timur-Tengah dan juga menciptakan kesan buruk terhadap wilayah Timur-Tengah.

## **Simpulan**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa propaganda media dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Melalui sebuah kelompok kepentingan dan media, propaganda dapat dijalankan untuk menyebarkan ide-ide atau ideologi dan juga membentuk opini masyarakat sebuah negara bahkan komunitas Internasional, yang dalam penelitian ini media yang melakukan penyebaran ide dan juga membentuk opini ini adalah *The New York Times*.

Timur Tengah secara geografis merupakan kawasan yang sangat strategis sehingga kawasan ini selalu menjadi pusat perhatian dunia, perhatian ini semakin intens sejak terjadinya serangan 9/11 yang oleh Amerika Serikat digunakan sebagai alasan penggunaan kebijakan yang agresif terhadap wilayah ini. Hal inilah yang kemudian menarik para warta berita berbondong-bondong untuk meliput dan memberitakan pada masyarakat dunia mengenai apa yang tengah terjadi disana dengan sedetail mungkin dan berupaya untuk selalu menjadi yang terakurat dan terdepan dalam mengangkat isu-isu yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini.

Dalam penelitian ini terbukti bagaimana *The New York Times* telah ikut terlibat dalam mendukung kebijakan pemerintahan Amerika Serikat yang sangat Pro Isreal. Penelitian ini menjelaskan bagaimana *The New York Times* baik atas keinginan perusahaan dan keinginan pemerintahan Amerika Serikat melakukan pemberitaan yang tidak seimbang mengenai konflik ini, *The New York Times* telah melakukan framing terhadap berita mengenai konflik kedua negara ini dengan mendeskreditkan posisi negara palestina sebagai sosok teroris maupun pengacau, sedangkan negara Israel adalah korban dari kebrutalan dari tetangga Arabnya yang barbar dan rakyat Amerika harus bersatu dengan pemerintahannya untuk mendukung Israel.

Peran *The New York Times* sebagai salah satu instrumen propaganda Amerika Serikat dapat dilihat secara lebih mendalam, *The New York Times* melakukan propaganda mengenai terorisme ini terus-menerus berlanjut sehingga terbentuk opini mengenai *War on Terorisme* pasca kejadian 9/11 tersebut. Propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui *The New York Times* ini dilakukan secara terus-menerus di berbagai belahan dunia dan menyangkal bentuk berita yang disampaikan oleh media massa Timur Tengah. Pada penelitian

ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peranan *The New York Times* Dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Wilayah Timur Tengah Pasca Kejadian 9/11 adalah dengan melakukan aktivitas propaganda internasional dengan menggunakan metode *Glittering Peace Keeping* terhadap Amerika Serikat dan *Name Calling Teroris* terhadap wilayah Timur Tengah.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chomsky, Noam.(1989). *Necessary Illusions: Thought Control In Democratic Societies*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_ (2005). *Kuasa Politik Media*. Yogyakarta: Pinus Jogjakarta.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Chomsky Propaganda Model*. University of Windsor: Canada. 2007.
- De Tocqueville, Alexis, (1945), *Democracy In America*, New York: Vintage Book.
- Edward S Herman&Noam Chomsky (2002). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.
- Griffin, EM. (2003). *A First Look at Communication Theory*. US. McGraw-Hill Comanies, Inc.
- Hamad, Ibnu.(2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Ippolito, Dennis S. dan Thomas G. Walker, (1980), *Political Parties, Interest Groups, and Publik Policy: Group Influence In American Politics*, New Jersey: PrenticeHall Inc..

### Jurnal

- Crelinstery Ronald D. (1989). 'Terrorism and the Media: Problems, Solutions and Counterproblems.' *Political Communication and Persuasiorz*. Vol. 6 hal. 31,1,-339.
- Ganor, Boaz. (2002). 'Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?' *Media Asia Communication Quarterly*. Giessmann, Hans Vol 20 No. 3. hal. 123-133.
- Hill, Christopher. (2002). 'L'1.September 2001: Perspectives from International Relations.' *International Relations*. Vol. 16 No. 2. hal. 257-262.
- Knox, Colin. (2001). 'The "Deservng" Victims of Political Violence: "Punishment" Attacks in Northern Ireland.' *Criminal 1 No. 2*. hal. 787-199.
- Louw, P. Eric. (2003). 'The War Against Terrorism.' *Gazette: The International* hal. 217-230. *Journal for Jurnalisme. Justice. Communication Studies*. Vol 65 No. 3.
- Nacos, Brigitte L. dan Oscar Torres-Reyna. (2003). 'Framing Muslim- Americans Before and After 91L7.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Framing Terrorisnt: The News Media, the Government and the Publik*. New York: Routledge. hal. 133-157.
- Norris, Pippa; Montague Kern; dan Marion Just. (2003a). 'Framing Terrorism.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Fra'tning Tiriorism: The News Media, the Government and the Publik*. New York: Routledge. hal. 3-23.

### WEB

- Barat Terkejut Hadapi Narasumber Media Arab dalam Perang Afghanistan diakses dari <http://www.gatra.com/2001-10-17/artikel.php?id=11688> pada 10 agustus 2012
- Cyber war dalam Media massa tersedia <http://www.djogdjaku.110mb.com/book/cyberwar/cyberjihad.php> pada 27 Agustus 2012
- Bin Laden's Terrorism Isn't About the Palestinian?* Diakses dari [www.The New York Times online.com](http://www.TheNewYorkTimes.com) pada tanggal 12 Januari 2013